



# PERJANJIAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 22 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
Bupati Badung,  
  
I Nyoman Giri Prasta

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Badung,  
  
I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750207 199311 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</li> <li>- Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung.</li> <li>- Indeks keterbukaan informasi publik</li> <li>- Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah</li> </ul>	Persen - Nilai Indek Persen	60 - 80 89
2.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.</li> </ul>	Persen	100
3.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan</li> </ul>	Persen	100

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.177.175.743,00	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 6.441.961.766,00	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	Rp. 47.044.522.929,00	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 79.759.415,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 196.985.225,00	APBD



PIHAK KEDUA  
 Bupati Badung,

I Nyoman Giri Prasta



Mangupura, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung,

I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah,

Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2024. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian Kabupaten Badung.
2. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi Bali.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Tujuan Perjanjian Kinerja**

- a. Untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Untuk menilai keberhasilan organisasi.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **2.1.1 VISI DAN MISI**

Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yaitu ***“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”***. Visi tersebut mencerminkan apa yang ingin dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen dan mampu menjamin pembangunan di Kabupaten Badung yang berkesinambungan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan penjabaran dari visi Pemerintah Kabupaten Badung ditetapkan sebanyak 9 (Sembilan) misi dengan 11 (Sebelas) tujuan serta 19 (Sembilan belas) Sasaran. Dalam tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pelaksanaan dari misi yang kedua, yaitu :

Misi 2 :

***“Memantapkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi”***.

Sedangkan dari 11 (Sebelas) tujuan Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan ke 2 (Dua) yaitu ***“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”***

Dan untuk 19 (Sembilan belas) sasaran Kabupaten Badung, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung sasaran ke 3 (Tiga) yaitu ***“Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel”***

##### **2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagaimana Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu ***“Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung Kabupaten Badung menuju smart city”*** dengan Indikator Tujuan ***“Nilai Indeks SPBE”***. Berdasarkan Tujuan dan Indikator Tujuan, Sasaran Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yaitu :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah

Adapun Indikator Sasarannya yaitu:

1. Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi
2. Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung.
3. Indeks keterbukaan informasi publik.
4. Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah.
5. Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
6. Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan.

## **B. Indikator Kinerja Utama dan Program**

Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, pada masing – masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2024.

Dengan demikian sasaran serta indikator kinerja utama pada Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<div>- Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</div> <div>- Persentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung</div> <div>- Indeks keterbukaan informasi publik</div> <div>- Persentase Kelompok KIM yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah</div>	<div>60</div> <div>-</div> <div>80</div> <div>89</div>
2.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<div>- Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</div>	100
3.	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	<div>- Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang - undangan.</div>	100



Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan diantaranya 4 (Empat) program merupakan program prioritas yang didukung oleh 6 (Enam) kegiatan dan 23 (Dua puluh dua) sub kegiatan.

Program Utama yang mendukung indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik. Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan.
2. Program Aplikasi Informatika. Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor. Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan

### **C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki 5 (Lima) program yang didukung oleh 13 (Tiga belas) kegiatan dengan 43 (Empat puluh tiga) sub kegiatan, dimana 4 (Empat) program dan 6 (Enam) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan diantaranya merupakan pendukung indikator utama. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2024 sebesar **Rp. 71.940.405.078,- (Tujuh puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu tujuh puluh delapan rupiah)** yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2024, yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar **Rp. 71.532.027.922,- (Tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)**. Anggaran belanja modal sebesar **Rp . 408.377.156,- (Enam ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah)**. Dengan target Pendapatan Jasa Giro sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dokumen Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung mengacu kepada Renstra Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Mangupura, 22 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informasi Kabupaten Badung,



I Gusti Ngurah Gede Java Saputra, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19750207 199311 1 002

# PERJANJIAN KERJA

Tahun: 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
1	TUJUAN: Terwujudnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung Kabupaten Badung menuju smart city		
	Indeks SPBE		
	SASARAN: Meningkatnya tata kelola serta kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi		
	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Target	60
		Rp.	21.085.441.393
	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung	Target	
		Rp.	44.136.257.279
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Target	80
		Rp.	6.142.253.899
	Persentase Kelompok KIM yang Melaksanakan Disiminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Target	89
		Rp.	299.707.867
	PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	Target	100
		Rp.	2.908.265.650
	KEGIATAN: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	41
		Rp.	2.908.265.650
	SUBKEGIATAN: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Target	12
		Rp.	970.322.600
	SUBKEGIATAN: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Target	
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Target	5
		Rp.	1.757.004.950
	SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Target	2
		Rp.	3.054.200
	SUBKEGIATAN: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		
	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Target	12

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
		Rp.	177.883.900
	<b>SUBKEGIATAN: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</b>		
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Target	
		Rp.	0
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		
	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	Target	100
		Rp.	44.136.257.279
	<b>KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	26
		Rp.	44.136.257.279
	<b>SUBKEGIATAN: Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Target	2
		Rp.	63.470.745
	<b>SUBKEGIATAN: Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Target	12
		Rp.	4.370.674.291
	<b>SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>		
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Target	999
		Rp.	39.702.112.243
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Target	100
		Rp.	6.142.253.899
	<b>KEGIATAN: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	95
		Rp.	6.142.253.899
	<b>SUBKEGIATAN: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Target	36
		Rp.	203.143.164
	<b>SUBKEGIATAN: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Target	12
		Rp.	5.785.222.987
	<b>SUBKEGIATAN: Pelayanan Informasi Publik</b>		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Target	12
		Rp.	153.887.748
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>		
	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Target	100
		Rp.	299.707.867
	<b>KEGIATAN: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	95
		Rp.	299.707.867
	<b>SUBKEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Target	12
		Rp.	170.225.121
	<b>SUBKEGIATAN: Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Target	12
		Rp.	19.119.142
	<b>SUBKEGIATAN: Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</b>		
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Target	1
		Rp.	7.555.534
	<b>SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</b>		
	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Target	10
		Rp.	44.920.344
	<b>SUBKEGIATAN: Layanan Hubungan Media</b>		
	Jumlah Layanan Hubungan Media	Target	6
		Rp.	57.887.726
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Target	100
		Rp.	18.177.175.743
	<b>KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Target	26
		Rp.	96.488.290
	<b>SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target	6
		Rp.	49.405.915
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>		



No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Target	12
		Rp.	0
	<b>SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Target	8
		Rp.	47.082.375
	<b>KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target	75
		Rp.	16.109.540.311
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Target	742
		Rp.	16.077.348.311
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Target	44
		Rp.	20.264.400
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target	12
		Rp.	9.079.600
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Target	5
		Rp.	2.848.000
	<b>KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Target	15
		Rp.	83.949.603
	<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</b>		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Target	15
		Rp.	0
	<b>SUBKEGIATAN: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>		
	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai	Target	12
		Rp.	83.949.603
	<b>KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target	36
		Rp.	299.156.480
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Target	12
		Rp.	2.000.000
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Target	12
		Rp.	167.452.000
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target	12
		Rp.	129.704.480
	<b>KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target	33
		Rp.	253.295.199
	<b>SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target	4
		Rp.	0
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Target	12
		Rp.	40.296.000
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Target	3
		Rp.	11.788.300
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Target	12
		Rp.	176.230.700
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Target	2
		Rp.	22.268.820
	<b>SUBKEGIATAN: Fasilitas Kunjungan Tamu</b>		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Target	12
		Rp.	2.711.379
	<b>KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	74
		Rp.	408.377.156
	<b>SUBKEGIATAN: Pengadaan Mebel</b>		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Target	37
		Rp.	49.628.749
	<b>SUBKEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Target	37
		Rp.	358.748.407
	<b>KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target	87
		Rp.	926.368.704
	<b>SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Target	1
		Rp.	0
	<b>SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Target	51
		Rp.	122.696.824
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Target	7
		Rp.	663.902.660
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Target	28
		Rp.	139.769.220
	<b>SASARAN: Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</b>		
	Persentase data statistik sektoral Kabupaten Badung yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Target	100
		Rp.	79.759.415
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>		
	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Target	100
		Rp.	79.759.415
	<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	Target	15
		Rp.	79.759.415
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Target	8
		Rp.	7.083.700
	<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</b>		
	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Target	47
		Rp.	62.750.890
	<b>SUBKEGIATAN: Membangun Metadata Statistik Sektoral</b>		
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Target	3
		Rp.	9.924.825

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024
	<b>SASARAN: Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah</b>		
	Persentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	Target	100
		Rp.	196.985.225
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>		
	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	Target	100
		Rp.	196.985.225
	<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	16
		Rp.	192.890.425
	<b>SUBKEGIATAN: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Target	4
		Rp.	2.112.380
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Target	4
		Rp.	3.872.580
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Target	4
		Rp.	184.936.865
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Target	38 PD
		Rp.	1.968.600
	<b>KEGIATAN: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	Target	4
		Rp.	4.094.800
	<b>SUBKEGIATAN: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Target	38 PD
		Rp.	4.094.800